

PERAN MATHLA'UL ANWAR MEMBENDUNG KAPITALISME PENDIDIKAN

Saepul Bahri¹, Muhajir²

¹Universitas Mathlaul Anwar Banten, Indonesia

²Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Hasanudin Banten, Indonesia

e-mail: ¹Muruyypisan@gmail.com, ²muhajir@uinbanten.ac.id

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Mathla'ul Anwar dalam upaya membendung pengaruh kapitalisme dalam sistem pendidikan di Indonesia. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif yakni menggambarkan peran Mathla'ul Anwar dalam membendung pengaruh kapitalisme dalam sistem Pendidikan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, sedangkan kemasahan data menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan dapat membentuk karakter dan mengembangkan potensi generasi muda, dilakukan melalui langkah-langkah pengawasan yang ketat, penekanan pada kualitas dan nilai-nilai, serta pemberian beasiswa dan Mathla'ul Anwar telah menjadi garda terdepan dalam melindungi integritas Pendidikan.

Keywords: Kapitalisme, Pendidikan, Mathla'ul Anwar

Abstrak

This study aims to analyze the role of Mathla'ul Anwar in efforts to stem the influence of capitalism in the education system in Indonesia. This type of research is qualitative, drawing on the role of Mathla'ul Anwar in stemming the influence of capitalism in the education system. Data collection was conducted through observation, in-depth interviews, and documentation. Data analysis is carried out through data collection, data presentation and conclusions, while data maturity uses source triangulation. The results show that education can shape the character and develop the potential of the younger generation, carried out through strict supervision measures, emphasis on quality and values, and the provision of scholarships and Mathla'ul Anwar has become the forefront in protecting the integrity of education.

Kata Kunci: Capitalism, Education, Mathla'ul Anwar

Accepted: September, 14 2023	Reviewed: September, 28 2023	Published: October, 01 2023
---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

A. Pendahuluan

Pendidikan memiliki peran sebagai salah satu pondasi utama dalam pembentukan karakter individu dan pembeda di masyarakat. Melalui pendidikan, stabilitas dan dinamika suatu bangsa dapat terwujud, sementara juga membawa bangsa tersebut menuju tingkat kehormatan yang diakui oleh komunitas internasional. Upaya pendidikan yang berkelanjutan oleh Lembaga Pendidikan berperan dalam meningkatkan kesadaran terhadap penipuan, mengatasi ketidakpengetahuan, mengurangi keterbelakangan mental, spiritual, dan teknologi. Orang-orang yang mendapatkan pendidikan yang layak cenderung memiliki karakter yang positif, selalu memprioritaskan keseimbangan dan profesionalisme dalam tindakan mereka, serta mampu memberikan kritik, saran, dan solusi untuk mengatasi masalah yang timbul. Namun, dalam era globalisasi dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, pendidikan juga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal yang mengancam nilai-nilai dasarnya. Salah satu ancaman yang muncul adalah konsepsi kapitalisme dalam pendidikan. (Purandina et al., 2022)

Kapitalisme pendidikan merupakan fenomena di mana pendidikan menjadi hak milik pribadi digunakan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dan berbuat sesukanya. Seperti banyak negara lain, Indonesia juga menghadapi sejumlah permasalahan terkait kapitalisme pendidikan yang menjadi perhatian masyarakat, akademisi, dan pemerintah. Beberapa masalah utama termasuk: Banyak lembaga pendidikan swasta di Indonesia berusaha untuk mengoptimalkan keuntungan finansial mereka dengan menerapkan biaya pendidikan yang tinggi tanpa adanya kesepakatan dengan wali siswa atau dengan seizin komite sekolah. Sementara di sekitar sekolah tersebut banyak masyarakat yang miskin tidak merasakan dampak positif dari sekolah tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan ketidaksetaraan dalam akses ke pendidikan, di mana hanya mereka yang memiliki sumber daya finansial yang mencukupi yang dapat memperoleh pendidikan berkualitas. (Zainal et al., 2014)

MI Mathla'ul Anwar sebagai salah satu Lembaga pendidikan juga memiliki potensi untuk terpengaruh oleh gelombang *kapitalisme* dalam pendidikan. *Komersialisasi* pendidikan, tekanan untuk mencapai standar akademik tertentu, dan dorongan ekonomi dapat menjadi salah satu tantangan yang signifikan dalam mempertahankan *integritas* pendidikan yang sesungguhnya. Hal ini menjadi semakin kompleks mengingat Kabupaten Pandeglang yang luas dan tersebarunya madrasah-madrasah di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau dari pusat kota, serta kurangnya pengawasan yang memungkinkan munculnya praktik *kapitalisme* pendidikan. Oleh karena itu, peran Mathla'ul Anwar Kabupaten

Pandeglang dalam melawan pengaruh kapitalisme pendidikan di MI Mathla'ul Anwar menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

Penelitian terdahulu yang menyinggung tentang *kapitalisme* Pendidikan diantaranya penelitian yang dilakukan Nurdin et al., (2016) untuk membendung *kapitalisme* Pendidikan agar di seluruh sekolah dikembangkan pola hubungan guru dan murid seperti dijelaskan bahwa orientasi Pendidikan tidak hanya tujuannya duniawi saja tetapi lebih besar pada urusan ukhrawi maka relasi yang dibangun antara guru dan murid adalah dalam lingkup penghambaan yang utuh. Solihin, (2015) mengemukakan bahwa Sekolah dianggap sebagai candu sosial, sekolah sering dijadikan objek bisnis, sekolah mahal, elitis, *diskriminatif*, sekolah tidak lebih hanyalah panggung kontes. Kini bermunculan rupa-rupa stratifikasi Pendidikan seperti Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), Sekolah Kategori Mandiri (SKM), Sekolah Standar Nasional (SSN), Sekolah Persiapan Pemenang Nobel (SPPN), Sekolah Penghasil Insan Kamil yang Kompetitif (SPIKK), Sekolah Nasional Plus (SNP), Sekolah Unggul (SU), Sekolah Reguler (SR), Jalur Khusus, Kelas Khusus, Kelas Internasional, Kelas Non Reguler, Kelas Eksekutif dan sejumlah label lainnya.

Musayyidi (2020) membuktikan bahwa lahirnya *komersialisme* Pendidikan diawali lahirnya kompetisi di dalam dunia Pendidikan. Kompetisi disebabkan adanya hubungan yang berat sebelah (ketimpangan) antara negeri dan swasta. Seharusnya Pendidikan melahirkan paradigma keadilan sosial dengan pendekatan pemberdayaan manusia dan memanusiakan manusia. Emawati (2018) menjelaskan dampak positif sebagai peluang di antara tantangan kapitalisme global adalah: Potensial membebaskan Peningkatan demokratisasi dan *equity* dalam Pendidikan; Akselerasi Ilmu Pengetahuan; Penyederhanaan kurikulum. Solusi yang tepat dalam Pendidikan islam untuk membendung kapitalisme adalah pendidikan humanis-religius.

Habiburrahman (2019) menjelaskan titik temu Islam dengan kapitalisme adalah keduanya ingin membela kaum pekerja dan ingin sistem ekonomi yang dapat mensejahterakan banyak orang. Dunia tidak bisa mengingkari bahwa *kapitalisme* adalah sistem ekonomi pencipta kesejahteraan yang paling berhasil. Rosyid (2019) menjelaskan sudah saatnya kita merubah paradigma pendidikan yang selama ini keliru. Paradigma pendidikan yang seharusnya ditanamkan adalah paradigma keadilan sosial, yang direkomendasi oleh Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 27 yang pertama menjadikan ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, yang kedua menjamin hak memperoleh pendidikan untuk semua. Paradigma keadilan sosial menuntut dijadikannya dasar membangun sistem persekolahan maupun pendidikan masyarakat luas usaha-usaha secara *preferensial* untuk mensubsidi peserta didik yang tertinggal secara ekonomi sosial.

Penelitian yang dilakukan peneliti memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya, dimana penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada program yang telah diterapkan oleh Mathla'ul Anwar Kabupaten Pandeglang dalam menjaga pendidikan melalui nilai-nilai, karakter, serta menghindari dampak buruk dari *kapitalisme* pendidikan. Selain itu juga menjelaskan bagaimana peran Mathla'ul Anwar Kabupaten Pandeglang dalam melawan pengaruh *kapitalisme* pendidikan di MI Mathla'ul Anwar. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi institusi pendidikan lainnya dalam menjaga integritas pendidikan sebagai dasar untuk masa depan yang berkelanjutan sehingga terhindar dari *kapitalisme* pendidikan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pengamatan lapangan (*observational research*). Metode ini digunakan untuk memahami tindakan, interaksi, atau kejadian yang terjadi dengan sendirinya dalam konteks yang alami. Tujuan utama dari pengamatan lapangan adalah untuk mengamati dan mencatat peristiwa atau tingkah laku dalam situasi yang alami, dengan tujuan memahami fenomena yang tengah diamati. (Arrobi, 2023) Pengumpulan data dilakukan melalui tahapan: Pengumpulan data primer yaitu melakukan wawancara dengan anggota Mathla'ul Anwar, tokoh pendidikan, dan pemangku kepentingan terkait. Kemudian melakukan observasi langsung pada program program Pendidikan Mathla'ul Anwar. Pengumpulan data sekunder yaitu Menganalisis dokumen internal Mathla'ul Anwar seperti laporan tahunan, kebijakan pendidikan, dan dokumen terkait lainnya. Analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, 2014), sedangkan kemasahan data menggunakan triangulasi sumber. Menganalisis data untuk mengidentifikasi pola, temuan kunci, dan peran Mathla'ul Anwar dalam melawan kapitalisme pendidikan. Identifikasi hambatan atau kendala yang dihadapi oleh Mathla'ul Anwar.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Islam dan Kapitalisme

Adam Smith, seorang ekonom Skotlandia pada abad ke-18 disebut sebagai "bapak *kapitalisme*." Smith memperjuangkan konsep bahwa ekonomi yang beroperasi tanpa campur tangan pemerintah akan mencapai efisiensi ekonomi melalui mekanisme pasar bebas. Dia menekankan peran penting "tangan tak terlihat" pasar dalam mengatur alokasi sumber daya. Smith juga berpendapat bahwa campur tangan pemerintah dalam pasar dapat menyebabkan kemunduran

ekonomi. Dalam kerangka pemikirannya, Smith mengemukakan lima prinsip *fundamental kapitalisme*: pertama, pengakuan hak kepemilikan pribadi tanpa batasan; kedua, penghargaan terhadap hak individu untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi; ketiga, pemahaman akan motivasi ekonomi yang mendorong semangat mencari keuntungan maksimal; keempat, kebebasan untuk bersaing; dan kelima, pengakuan hukum pasar bebas. (Rustiadi et al., 2020)

Karl Marx, seorang filsuf dan ekonom Jerman pada abad ke-19, memiliki pandangan yang secara mendasar berbeda mengenai *kapitalisme*. Dia mengkritik *kapitalisme* sebagai sistem yang menghasilkan ketidaksetaraan ekonomi, mengeksploitasi kelas pekerja, dan menjadikan individu terasing dari produk-produk kerja mereka. Marx juga mengantisipasi bahwa *kapitalisme* akan mengalami kejatuhan akibat konflik kelas yang tak dapat dihindari. Dia juga mengkritik pendahulunya, yakni Smith, karena dianggap terlalu berisiko dalam teorinya. Marx menegaskan bahwa dalam masyarakat *kapitalis*, pekerja mengalami alienasi atau perasaan terasing dari hasil kerja mereka. Hal ini terjadi karena pekerja tidak memiliki kendali atas proses produksi, tidak memiliki hak atas produk yang mereka hasilkan, dan merasa terpisah dari potensi kreatif mereka sendiri. (Purwanto, 2021) Marx menyoroti perpecahan antara pemilik modal (yang memiliki perusahaan atau modal) dan pekerja. Dia mengemukakan bahwa pemilik modal memanfaatkan tenaga kerja pekerja untuk memperoleh keuntungan, sementara pekerja hanya menerima upah yang relatif rendah. Marx berpendapat bahwa sistem *kapitalisme* menciptakan *eksploitasi*, di mana pemilik modal mengambil nilai tambah dari pekerja dalam bentuk keuntungan, sementara pekerja hanya dibayar untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

John Maynard Keynes, seorang ekonom Inggris pada abad ke-20, dikenal karena konsepnya mengenai "ekonomi *keynesian*." Keynes berargumen bahwa pemerintah seharusnya memiliki peran yang lebih aktif dalam mengatur ekonomi, terutama dalam menghadapi *depresi* ekonomi dan tingkat pengangguran yang tinggi. Dalam pandangan Keynes, *kapitalisme* membutuhkan campur tangan pemerintah untuk menjaga *stabilitas* ekonomi. Salah satu ide utama yang dikembangkan oleh Keynes adalah "permintaan efektif," yang mengatakan bahwa untuk memastikan ekonomi beroperasi pada kapasitas maksimal, pemerintah harus meningkatkan permintaan agregat melalui pengeluaran publik atau tindakan fiskal lainnya ketika sektor swasta tidak melakukan investasi yang cukup. Pendekatan Keynesian menyoroti pentingnya mengatasi pengangguran dan mengambil langkah-langkah kebijakan yang dapat menciptakan lapangan kerja, seperti proyek infrastruktur publik, pengeluaran pemerintah, dan dukungan kepada sektor swasta. (Syamsuddin Mochtar, 2018)

Dalam *kapitalisme*, kepemilikan *properti* dan sumber daya utama sepenuhnya dalam tangan individu, perusahaan swasta, atau entitas ekonomi lainnya. Ini mencakup hak untuk menggunakan, mengelola, dan mengalihkan properti, serta kebebasan ekonomi untuk berbisnis tanpa campur tangan pemerintah yang berlebihan. Kapitalisme mengandalkan pasar bebas, di mana harga ditentukan oleh penawaran dan permintaan, dan persaingan dianggap sebagai motor utama efisiensi ekonomi. Pemilik modal di *kapitalisme* dapat menghasilkan keuntungan dari investasi mereka, dan pemilik bisnis menggunakan modal ini untuk memproduksi barang dan layanan dengan harapan mendapatkan keuntungan.(Chapra, 2000)

Kepemilikan dalam Islam berlandaskan pada prinsip-prinsip yang berbeda dengan *kapitalisme* dan sistem ekonomi lainnya. Dalam Islam, kepemilikan *properti* dan aset diatur dengan mempertimbangkan nilai-nilai moral dan etika. Beberapa aspek utama tentang kepemilikan dalam Islam melibatkan pengakuan terhadap hak kepemilikan pribadi dan hak individu untuk memiliki harta, tanah, serta aset lainnya, yang sejalan dengan konsep kepemilikan pribadi dalam kapitalisme.(Medias, 2018) Islam juga mengajarkan bahwa kekayaan dan sumber daya yang dimiliki oleh individu merupakan amanah dari Allah, haknya Allah, manusia bukanlah pemilik sesungguhnya, manusia hanya diberi tanggung jawab untuk mengelola alam dengan bijak dan adil. Keuntungan bukanlah mutlak milik individu, tetapi terdapat pula hak-hak orang lain dan harus dirasakan oleh mereka. Salah satu konsep kunci dalam Islam adalah zakat, yang merupakan kewajiban memberikan sumbangan kepada yang membutuhkan dan berfungsi sebagai cara untuk membagi kekayaan secara adil dalam masyarakat serta mengurangi ketidaksetaraan ekonomi. Selain itu, dalam Islam dilarang melakukan *riba* (bunga) dan transaksi yang melibatkan praktik *ribawi*, karena *riba* dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan ekonomi, yang mencerminkan perhatian Islam terhadap keadilan dalam hubungan ekonomi.(Asri Jaya et al., 2023)

Islam menempatkan penekanan yang kuat pada keadilan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam ranah ekonomi. Prinsip ini tercermin dalam gagasan tentang distribusi yang adil dari kekayaan dan hak-hak ekonomi yang setara bagi setiap individu. Islam juga mengakui hak-hak pekerja, seperti hak mereka atas upah yang adil dan perlindungan dari eksploitasi. Prinsip-prinsip ini sering menghasilkan pembatasan pada cara bisnis dan industri beroperasi dalam konteks ekonomi Islam. Islam juga menyediakan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti mudharabah (bisnis bersama) dan musharakah (kemitraan), sebagai alternatif terhadap instrumen keuangan yang berbasis *riba* dalam kapitalisme konvensional. Selain itu, dalam Islam, individu didorong untuk menghindari sikap

egois dan serakah dalam kepemilikan mereka. Salah satu caranya adalah melalui pembayaran zakat dan memberikan sumbangan kepada yang membutuhkan, sebagai upaya untuk mengatasi sifat-sifat tersebut. (Hidayat, 2020)

Dalam perspektif Islam, konsep *profit* (keuntungan) memiliki aspek-etika yang kuat dan harus beriringan dengan prinsip-prinsip syariah yang mengatur keadilan, transparansi, dan kepatuhan kepada hukum Islam. Keuntungan dalam bisnis Islam seharusnya diperoleh secara halal, yang berarti tidak melanggar hukum agama atau nilai-nilai etika yang diwariskan oleh Islam. Selain itu, dalam ekonomi Islam, ada kewajiban untuk memberikan bagian yang adil kepada semua pihak yang terlibat dalam bisnis, termasuk pekerja, mitra bisnis, dan masyarakat. Konsep "*riba*" atau bunga dilarang dalam Islam, sehingga perolehan keuntungan tidak boleh didasarkan pada praktik bunga yang dianggap tidak etis. Oleh karena itu, dalam konteks bisnis Islam, profit harus dihasilkan melalui cara yang sah dan mematuhi prinsip-prinsip moral serta etika Islam untuk mencapai keseimbangan antara keuntungan dan keadilan.

Larangan *riba* dalam ekonomi adalah prinsip utama dalam ajaran Islam yang secara tegas mengharamkan praktik bunga atau *riba*. Konsep *riba*, yang secara harfiah berarti peningkatan atau tambahan, didefinisikan sebagai pertambahan yang diberlakukan dalam transaksi pinjaman uang atau hutang tanpa adanya upaya produktif yang jelas. Dalam Islam, *riba* dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang merugikan dan tidak adil, yang merusak keadilan sosial dan menciptakan ketidaksetaraan ekonomi. Tujuan larangan *riba* adalah untuk menggalakkan perdagangan yang adil, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan pembagian kekayaan yang lebih merata dalam masyarakat. (Zulfa, 2014)

2. Kapitalisme dalam konteks MI Mathla'ul Anwar

Penetrasi *kapitalisme* dalam lembaga pendidikan adalah proses dimana unsur-unsur ekonomi, komersialisasi, dan orientasi keuntungan memengaruhi sistem pendidikan pada berbagai tingkatan, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Implikasi dari penetrasi kapitalisme dalam lembaga pendidikan dapat bervariasi, tergantung pada pengelolaannya. (Surya & Taibe, 2022) Salah satu bentuk penetrasi *kapitalisme* adalah melalui komersialisasi pendidikan, yang melibatkan pemasaran sekolah, biaya pendidikan tinggi, dan pendekatan berorientasi profit. Misalnya, apabila sekolah MI Mathla'ul Anwar memaksa siswa membeli buku teks atau materi ajar mahal dari penerbit tertentu, tanpa adanya kesepakatan dengan orang tua bahkan membebani orangtua. Iklan perusahaan yang muncul di bangunan sekolah, buku teks, atau kelas dapat membawa unsur komersial ke dalam lingkungan pendidikan. Penjualan makanan tidak sehat kepada siswa oleh sekolah yang memiliki kontrak dengan produsen makanan dan minuman

juga dapat berdampak negatif pada kesehatan siswa. Sementara itu, apabila MI Mathla'ul Anwar menawarkan kursus persiapan ujian berbayar, yang menciptakan ketidaksetaraan dalam akses pendidikan berkualitas.

Dalam beberapa situasi, lembaga pendidikan bisa menjadi bisnis yang dimiliki oleh pemerintah, perusahaan atau individu. *Privatisasi* pendidikan bisa berdampak pada akses pendidikan dan meningkatkan ketidaksetaraan jika biaya pendidikan menjadi hambatan bagi banyak orang. Pendidikan sebagai industri adalah contoh umum dari privatisasi pendidikan, di mana sekolah-sekolah tersebut dimiliki dan dijalankan oleh entitas tertentu seperti perusahaan, yayasan, atau individu, dan sering kali mengenakan biaya pendidikan yang tinggi. Hal ini bisa menciptakan kesenjangan dalam akses pendidikan. Selain itu, ada perusahaan-perusahaan yang menyediakan *platform e-learning* dan kursus *online* sebagai bentuk *privatisasi* pendidikan. Mereka menawarkan berbagai kursus dan pelatihan yang dapat diakses oleh individu atau organisasi dengan biaya tertentu.

Penetrasi *kapitalisme* dalam lembaga pendidikan bisa mengakibatkan kurikulum disesuaikan dengan permintaan pasar kerja, yang mungkin berdampak pada penekanan pada keterampilan dan pekerjaan *spesifik* daripada pengembangan pribadi dan intelektual yang *komprehensif*. Beberapa industri dan sektor ekonomi bisa memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan isi kurikulum. Sebagai contoh, jika industri teknologi informasi sedang berkembang pesat, maka lembaga-lembaga pendidikan mungkin akan cenderung menawarkan program-program pendidikan dalam bidang teknologi informasi. Permintaan dari pasar kerja juga dapat memengaruhi jenis pelatihan dan pendidikan yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan. Kurikulum dapat disesuaikan untuk memenuhi permintaan pekerjaan tertentu yang menjanjikan prospek karir yang baik.

Penetrasi *kapitalisme* juga bisa mengubah perspektif terhadap tujuan pendidikan, di mana pendidikan yang sebelumnya mungkin dilihat sebagai usaha intelektual atau sosial kini lebih berkaitan dengan pencapaian finansial atau keuntungan ekonomi. Terdapat program-program pelatihan teknis atau kejuruan yang dirancang khusus untuk memberikan keterampilan yang diperlukan untuk pekerjaan tertentu. Contoh-contoh program ini mencakup pelatihan dalam bidang seperti teknik, IT, perawatan kesehatan, atau kuliner. Selain itu, ada program-program pelatihan yang berfokus pada pekerjaan tertentu, seperti kursus untuk menjadi teknisi komputer, perawat, atau teknisi otomotif. Tujuan pendidikan ini adalah untuk mempersiapkan siswa agar siap untuk bekerja dalam pekerjaan tertentu yang dianggap menguntungkan. (Aziz, 2019)

3. MI Mathla'ul Anwar Kabupaten Pandeglang Mengutamakan Prinsip dan Nilai Pendidikan Islam

Peranan pengurus Mathla'ul Anwar Kabupaten Pandeglang adalah untuk memastikan bahwa pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga di bawah naungannya tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip pendidikan yang baik. Dalam hal membendung pengaruh *kapitalisme* dalam pendidikan, pengurus Mathla'ul Anwar Kabupaten Pandeglang dapat memainkan peran penting. Pengurus Mathla'ul Anwar dapat memilih kurikulum sesuai dengan nilai-nilai Islam, yang berfokus pada pendidikan holistik dengan aspek moral, etika, dan nilai-nilai sosial Islam. (Ridwan & Abdurrahim, 2023) Mereka harus mulai dengan mengidentifikasi tujuan pendidikan lembaga, termasuk pengembangan keterampilan akademis, karakter, pemahaman agama, atau kombinasi dari semuanya. Pemilihan kurikulum harus melibatkan berbagai stakeholder seperti guru, orang tua, siswa, dan anggota komunitas untuk memahami kebutuhan dan harapan semua pihak. Evaluasi kebutuhan siswa, seperti tingkat usia, pengetahuan, minat, bakat, dan kemampuan, penting dalam penyesuaian kurikulum. Pilih metode pengajaran yang sesuai dengan tujuan pendidikan dan gaya belajar siswa, sesuai dengan visi dan misi pendidikan.

Pengurus Mathla'ul Anwar dapat mengelola pembiayaan pendidikan dengan lebih mandiri dan tidak hanya bergantung pada faktor ekonomi dan komersial. Mereka dapat mencari sumber pembiayaan alternatif seperti donasi, zakat, atau dana sosial untuk mendukung pendidikan yang lebih terjangkau. (Program Pengurus Daerah 2022-2026) Penting untuk merencanakan anggaran yang realistis berdasarkan kebutuhan sebenarnya dan memantau penerimaan dan pengeluaran secara berkala melalui laporan keuangan. Identifikasi dan kendalikan biaya yang tidak perlu serta pilih sumber dana yang paling sesuai. Lakukan evaluasi kinerja keuangan secara rutin dengan analisis rasio keuangan, dan pastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pembiayaan dengan menyediakan laporan keuangan kepada pemangku kepentingan.

Pengurus Mathla'ul Anwar memberikan dukungan yang lebih kuat kepada pendidik (guru) untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan berfokus pada prinsip-prinsip Islam. Mereka dapat menyelenggarakan program pelatihan dan pengembangan profesional yang bertujuan mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam proses pembelajaran. Dalam rangka ini, penting untuk menyediakan pelatihan berkualitas tinggi kepada para pendidik, yang mencakup penggunaan teknologi pendidikan, Memberikan dukungan mentor atau pembimbing yang berpengalaman kepada pendidik yang lebih baru atau membutuhkan panduan tambahan juga dapat membantu mereka mengatasi tantangan dan meningkatkan

keterampilan mereka. Mendorong kolaborasi antara pendidik untuk berbagi ide, pengalaman, dan sumber daya juga merupakan cara yang efektif untuk menghasilkan praktik terbaik dan peningkatan kolektif dalam kualitas pengajaran.

Pengurus Mathla'ul Anwar melakukan *advokasi* untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan berbasis nilai-nilai Islam dengan berbagai cara. Mereka dapat mengorganisir acara-acara publik, seminar, atau kampanye pendidikan untuk melibatkan masyarakat dalam diskusi tentang peran penting pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Salah satu aspek penting dari advokasi adalah memberikan informasi dan pendidikan kepada masyarakat tentang isu-isu yang relevan. Ini melibatkan penyampaian fakta, statistik, dan bukti yang dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang masalah tersebut. Advokasi juga mendorong terjadinya diskusi publik tentang isu-isu yang diangkat, melibatkan berbagai pihak yang memiliki pandangan berbeda, yang dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan sudut pandang yang beragam.

Kebijakan dan program pengurus Mathla'ul Anwar Kabupaten Pandeglang terkait pendidikan dapat berfokus pada mempromosikan pendidikan yang berkualitas dan berdasarkan nilai-nilai Islam. Pengurus Mathla'ul Anwar memiliki peran penting dalam mengembangkan kurikulum pendidikan yang berbasis nilai-nilai Islam. Salah satu aspek utama dalam pengembangan kurikulum ini adalah integrasi ajaran agama, etika, moral, serta nilai-nilai sosial Islam ke dalam seluruh mata pelajaran yang diajarkan. Tujuannya adalah agar siswa mendapatkan pendidikan yang holistik yang mencakup aspek-aspek ini dalam setiap aspek pembelajaran mereka. Selain pengembangan kurikulum, pengawasan juga merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas pendidikan. Ini mencakup evaluasi terhadap kurikulum yang digunakan oleh lembaga-lembaga pendidikan, termasuk penilaian apakah kurikulum tersebut sesuai dengan standar pendidikan dan apakah materi pelajaran yang diajarkan relevan dan mutakhir.

Pengawasan juga melibatkan pemantauan kondisi fisik dan keamanan lingkungan di sekolah, termasuk fasilitas fisik, peralatan, serta prosedur keamanan. Hal ini dilakukan untuk memastikan keselamatan dan kesehatan siswa. Proses akreditasi juga menjadi bagian dari pengawasan yang bertujuan untuk mengawasi dan menilai kualitas lembaga-lembaga pendidikan, memberikan sertifikasi bahwa mereka memenuhi standar tertentu. Selain itu, pengawasan harus memastikan bahwa hak-hak siswa dilindungi, termasuk hak atas pendidikan yang layak, tanpa diskriminasi, dan dengan perlakuan yang adil. Selain itu, menyusun dan memeriksa anggaran lembaga pendidikan juga merupakan tugas penting dalam pengawasan, untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan digunakan secara efisien dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pengurus Mathla'ul Anwar memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat. Salah satu *inisiatif* yang dapat mereka lakukan adalah menginisiasi program bantuan keuangan atau beasiswa. Program-program ini dapat diarahkan untuk mendukung keluarga-keluarga yang kurang mampu secara finansial. Melalui bantuan keuangan atau beasiswa ini, diharapkan dapat mengatasi hambatan finansial yang sering kali menjadi penghalang utama dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas. Dengan mengimplementasikan program-program bantuan keuangan ini, Pengurus Mathla'ul Anwar dapat memastikan bahwa pendidikan berbasis nilai-nilai Islam dapat diakses oleh semua orang, tanpa memandang latar belakang ekonomi. Ini adalah langkah penting dalam mendukung inklusivitas dan kesetaraan dalam sistem pendidikan, serta membantu menciptakan peluang pendidikan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi masyarakat yang mereka layani.

Pengawasan yang rutin merupakan salah satu fungsi utama Pengurus Mathla'ul Anwar dalam menjaga kualitas lembaga-lembaga pendidikan yang beroperasi di bawah naungannya. (keputusan Ketua 2023) Pengawasan ini memiliki dua aspek penting yang perlu diperhatikan. Pertama, pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga pendidikan tersebut mematuhi standar pendidikan yang telah ditetapkan. Ini mencakup evaluasi kurikulum, metode pengajaran, dan berbagai aspek lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan. Dengan melakukan pengawasan ini, Pengurus dapat memastikan bahwa siswa menerima pendidikan yang sesuai dengan standar kualitas tertentu. selain itu, pengawasan juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa nilai-nilai Islam dihormati dan terintegrasi dalam seluruh aspek pendidikan di lembaga-lembaga tersebut. Hal ini mencakup pemantauan terhadap metode pengajaran yang sesuai dengan ajaran Islam, pengintegrasian nilai-nilai moral dan etika dalam proses pembelajaran, serta kesesuaian isi kurikulum dengan nilai-nilai Islam.

Integrasi nilai-nilai Islam dalam kurikulum menjadi langkah esensial dalam upaya memastikan bahwa pendidikan mencerminkan prinsip-prinsip Islam yang mendasar. Hal ini mencakup penyelarasan materi pelajaran, metode pengajaran, dan tujuan pendidikan dengan ajaran Islam yang menjadi dasar bagi masyarakat. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai Islam dalam kurikulum membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang sesuai dengan keyakinan agama dan memberikan landasan yang kuat bagi pemahaman yang lebih mendalam tentang ajaran Islam. Selain itu, langkah ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang holistik tentang agama, serta nilai-nilai sosial dan moral yang terkait dengannya. Integrasi nilai-nilai Islam dalam kurikulum tidak hanya terbatas pada

aspek teologis, tetapi juga melibatkan aspek-aspek kultural, sosial, dan etika yang terkait dengan Islam.

Dalam rangka meningkatkan pendidikan berbasis nilai-nilai Islam, beberapa langkah kunci dapat diambil. Pertama, perlu dilakukan perancangan kurikulum Islami yang mengintegrasikan ajaran agama, etika, dan moral Islam dalam semua mata pelajaran, memastikan relevansi dengan subjek yang diajarkan. Selanjutnya, pelatihan guru menjadi hal penting agar mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang Islam dan cara mengintegrasikannya dalam pengajaran mereka. Sumber belajar Islami juga harus tersedia, seperti buku teks dan materi pembelajaran yang menekankan ajaran agama dan etika Islam. Penggunaan studi kasus yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dan kaitannya dengan prinsip-prinsip Islam dapat membantu siswa melihat bagaimana nilai-nilai Islam dapat diterapkan dalam situasi dunia nyata. Selain itu, penggunaan Al-Qur'an dan Hadis sebagai dasar pembelajaran juga dianjurkan, dengan bimbingan dari guru. Diskusi dan refleksi di kelas tentang nilai-nilai moral dan etika Islam yang terkait dengan topik pelajaran perlu mendorong pemahaman yang lebih dalam.

4. Penguatan Komite MI Mathla'ul Anwar Kabupaten Pandeglang

Komite sekolah memegang peran penting dalam mengawasi proses pemilihan dan pengembangan kurikulum di sekolah. Mereka bertugas untuk memastikan bahwa kurikulum yang diusulkan sejalan dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dan mampu mencerminkan nilai-nilai etis yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Komite sekolah memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi potensi pengaruh tekanan komersial dalam pengembangan kurikulum. Dengan melakukan hal ini, mereka dapat memastikan bahwa pembelajaran yang diberikan kepada siswa tetap bermakna dan tidak terdistorsi oleh kepentingan komersial yang mungkin ada di luar sana. Komite sekolah juga memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa kurikulum tetap relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman. Mereka dapat membantu mengintegrasikan elemen-elemen baru yang muncul dalam bidang pendidikan, seperti teknologi dan ilmu pengetahuan terbaru, ke dalam kurikulum sekolah. (Daryono, 2020)

Komite sekolah dalam menentukan kriteria seleksi guru sangat penting dalam memastikan bahwa sekolah memiliki staf pengajar yang berkualitas dan berkomitmen terhadap pendidikan yang bermutu. Mereka bertugas untuk merumuskan kriteria seleksi yang jelas dan transparan, yang mencakup aspek-aspek seperti pendidikan, pengalaman, keterampilan pedagogis, serta komitmen terhadap nilai-nilai etis dalam proses pengajaran. Dengan demikian, komite sekolah dapat memastikan bahwa guru-guru yang dipekerjakan bukan hanya memiliki

kemampuan akademik yang memadai, tetapi juga memiliki semangat untuk mengembangkan karakter dan moral siswa. Komite sekolah juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seleksi guru tidak semata-mata didasarkan pada pencapaian ekonomi semata. Mereka harus memastikan bahwa proses seleksi guru mengutamakan integritas, komitmen, dan etika yang kuat dalam pendidikan. (Puluhulawa, 2023)

Komite sekolah memiliki peran sentral dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pengajaran di lingkungan sekolah. Salah satu tugas utama mereka adalah melakukan pemantauan secara berkala terhadap metode pengajaran yang digunakan oleh guru-guru. Hal ini penting agar pengajaran tidak hanya berfokus pada persiapan ujian semata, tetapi juga memberikan perhatian yang cukup pada pengembangan karakter dan pemahaman yang mendalam pada materi pelajaran. Melalui pemantauan ini, komite sekolah dapat memastikan bahwa setiap guru mengadopsi pendekatan pembelajaran yang holistik, mengintegrasikan nilai-nilai etis, dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sebagai individu yang berpendidikan baik. Selain itu, komite sekolah juga bertanggung jawab untuk memfasilitasi dialog dan kerja sama antara guru-guru, siswa, dan orang tua dalam merancang strategi pengajaran yang lebih efektif dan berdaya guna.

Peran komite sekolah dalam memfasilitasi kolaborasi dengan orangtua sangat penting dalam membangun hubungan yang kuat antara sekolah dan keluarga siswa. Melalui pertemuan rutin dengan orangtua, seperti pertemuan wali murid atau forum orangtua-guru, komite sekolah dapat memberikan platform untuk mendiskusikan perubahan yang diperlukan dalam pendidikan. Dalam pertemuan ini, orangtua dapat memberikan pandangan, masukan, dan umpan balik mereka tentang pengalaman belajar anak-anak mereka. Ini memungkinkan sekolah untuk mendengarkan perspektif orangtua dan memahami kebutuhan siswa dari sudut pandang yang lebih komprehensif. Selain pertemuan langsung, komite sekolah juga dapat mempromosikan pertukaran gagasan dan informasi secara berkala antara sekolah dan orangtua. Ini dapat dilakukan melalui surat kabar sekolah, newsletter, atau platform daring khusus yang memungkinkan orangtua untuk tetap terinformasi tentang perkembangan pendidikan dan terlibat dalam perubahan yang sedang berlangsung. (Budi & LLAJ, 2022)

5. Penguatan Orang Tua Siswa MI Mathla'ul Anwar Kabupaten Pandeglang

Keterlibatan orangtua dalam kehidupan sekolah anak-anak memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan akademik dan sosial siswa. Salah satu cara utama untuk terlibat adalah dengan menghadiri pertemuan orangtua-guru secara rutin. Pertemuan ini memberikan kesempatan bagi orangtua untuk berbicara langsung dengan guru-guru anak mereka, mendapatkan pemahaman tentang

perkembangan akademik dan perilaku anak, serta mengidentifikasi area-area yang mungkin perlu perhatian lebih. Selain itu, pertemuan orangtua-guru juga menciptakan saluran komunikasi yang terbuka antara sekolah dan keluarga, memungkinkan kolaborasi yang lebih baik dalam mendukung keberhasilan pendidikan anak-anak. Selain menghadiri pertemuan orangtua-guru, berpartisipasi dalam kegiatan sekolah dan berkontribusi dalam komite sekolah adalah cara lain bagi orangtua untuk aktif terlibat dalam kehidupan sekolah anak-anak mereka. Dengan berpartisipasi dalam kegiatan seperti pameran seni, acara olahraga, atau proyek-proyek sekolah lainnya, orangtua dapat mendukung perkembangan sosial dan emosional anak-anak mereka, serta memperkuat rasa komunitas di dalam sekolah.

Keterlibatan orangtua dalam pemantauan perkembangan pendidikan anak-anak merupakan faktor kunci untuk mendukung kesuksesan belajar mereka. Orangtua yang terlibat secara aktif dalam kehidupan pendidikan anak-anak mereka dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dan memotivasi mereka untuk mencapai potensi terbaik. Ini mencakup diskusi teratur tentang pelajaran, pencapaian akademik, dan tantangan yang dihadapi anak-anak dalam proses belajar. Dengan berbicara secara terbuka tentang prestasi dan kesulitan, orangtua dapat memberikan dukungan emosional yang diperlukan, memberikan motivasi tambahan, dan membantu anak-anak mengatasi hambatan akademik. Selain itu, pemantauan perkembangan pendidikan juga mencakup pemahaman tentang kebijakan sekolah yang mempengaruhi pendidikan anak-anak. Orangtua perlu memahami peraturan sekolah, kurikulum, dan kebijakan lain yang dapat memengaruhi pengalaman pendidikan anak-anak mereka. (Zaini, 2023)

Peran orangtua dalam mendukung pendidikan anak-anak mereka tidak hanya terbatas pada pencapaian akademis, tetapi juga mencakup perkembangan karakter, etika, dan moral. Mendorong pendidikan yang holistik berarti memahami bahwa pendidikan tidak hanya tentang pengetahuan akademis, tetapi juga tentang pembentukan pribadi yang seimbang. Orangtua dapat berperan sebagai model bagi anak-anak mereka dengan menunjukkan nilai-nilai seperti integritas, empati, tanggung jawab, dan kerja keras dalam kehidupan sehari-hari. Mereka dapat mendorong sikap positif dan perilaku yang mendukung perkembangan karakter yang kuat pada anak-anak mereka. Orangtua juga dapat berbicara secara terbuka dengan anak-anak mereka tentang nilai-nilai yang penting dalam kehidupan, seperti hormat, kerjasama, dan kejujuran. (Sani & Kadri, 2016)

Peran orangtua sebagai advokat untuk pendidikan yang berkualitas memiliki dampak yang sangat positif pada perbaikan sistem pendidikan di komunitas mereka. Orangtua dapat berperan sebagai suara yang kuat dalam mendukung

perubahan yang positif dalam pendidikan anak-anak mereka dan anak-anak lainnya. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan berpartisipasi dalam kelompok advokasi pendidikan di tingkat komunitas atau regional. Dalam kelompok ini, orangtua dapat bekerja sama dengan sesama orangtua dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengidentifikasi masalah-masalah penting dalam pendidikan, mengusulkan solusi, dan mempromosikan perubahan yang dibutuhkan. orangtua juga dapat mendukung kebijakan pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai dengan mengikuti perkembangan kebijakan dan berpartisipasi dalam dialog dengan pemimpin sekolah dan distrik. (Nurfadhillah, 2021)

Peningkatan pemahaman orangtua tentang dampak kapitalisme dalam pendidikan adalah langkah kunci dalam memahami dinamika yang memengaruhi sistem pendidikan. Kapitalisme telah memainkan peran yang signifikan dalam pengaruh terhadap pendidikan, seperti pengaruh perusahaan besar dalam industri pendidikan, komersialisasi pendidikan, dan tekanan untuk mengukur prestasi siswa secara kuantitatif. Oleh karena itu, orangtua dapat melakukan upaya untuk mendalami isu-isu ini dengan membaca, berpartisipasi dalam diskusi, dan belajar dari sumber-sumber yang beragam. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak kapitalisme dalam pendidikan, orangtua dapat menjadi advokat yang lebih efektif untuk mengatasi masalah-masalah yang mungkin timbul akibat pengaruh ini. Selanjutnya, orangtua dapat berperan dalam berbagi pengetahuan mereka dengan anggota komunitas sekolah lainnya. Ini bisa dilakukan melalui pertemuan komite sekolah, forum orangtua-guru, atau diskusi-diskusi informasi yang berfokus pada isu-isu pendidikan.

D. Simpulan

Peran Pengurus MI Mathla'ul Anwar Kabupaten Pandeglang dalam membendung *kapitalisme* pendidikan dilakukan melalui pengawasan ketat, penekanan pada kualitas dan nilai-nilai, serta pemberian beasiswa, sehingga MI Mathla'ul Anwar telah menjadi garda terdepan dalam melindungi integritas pendidikan. Pengalaman Mathla'ul Anwar Kabupaten Pandeglang mengingatkan kita bahwa pendidikan seharusnya tidak diperdagangkan demi keuntungan semata, tetapi harus menjadi sarana untuk mempersiapkan generasi masa depan yang unggul secara moral, intelektual, dan sosial. Semua pihak, baik lembaga pendidikan, pemerintah, maupun masyarakat, perlu bersatu tangan untuk memastikan pendidikan tetap menjadi hak fundamental bagi setiap individu, bukan sekadar komoditas yang dapat dibeli. Bagi penelitian selanjutnya dapat meneliti tentang kapitalisme dengan memperbandingkan dengan Institusi Pendidikan Lain.

Daftar Rujukan

- Arrobi, J. K. W. P. A. W. K. I. S. S. M. A. A. P. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Pendidikan: Pengenalan software QSR NVIVO*. Get Press Indonesia.
- Asri Jaya, S. E., Syaripuddin, S. E., Darnilawati, S. E., Nurwahyuni, M. S., Misno, S. H. I., SE, M. E. I., Nuryanti, S. E. I., Mei Santi, S. S., Sy, M., & Afdhol Rinaldi, S. E. (2023). *EKONOMI SYARIAH*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Aziz, A. (2019). *Ekonomi Politik Monopoli*. Airlangga University Press.
- Budi, E. S., & LLAJ, A. M. (2022). *Penguatan Peran Orang Tua dan Sekolah untuk Masa Depan Anak di Era Milenial*. CV. Bintang Semesta Media.
- Chapra, M. U. (2000). *Islam dan tantangan ekonomi*. Gema Insani.
- Daryono, D. (2020). *Menuju Manajemen Berbasis Sekolah*. Lembaga Academic & Research Institute.
- Emawati, E. (2018). Dampak Kapitalisme Global Terhadap Pendidikan Islam. *Jurnal Penelitian Keislaman*, 14(2), 136–152.
- Habiburrahman, H. (2019). Islam dan Kapitalisme; Titik Temu dan Kritik Dalam Al-Qur'an. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 1(1), 38–50.
- Hidayat, Y. (2020). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Prenada Media.
- Medias, F. (2018). *Ekonomi Mikro Islam: Islamic Microeconomics*. Unimma Press.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. Sage Publications.
- Musayyidi, M. (2020). Menyoal komersialisasi pendidikan di Indonesia. *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman*, 8(1), 125–140.
- Nurdin, M., Muzakki, M. H., & Sutoyo, S. (2016). Relasi Guru Dan Murid (Pemikiran Ibnu 'Athaillah Dalam Tinjauan Kapitalisme Pendidikan). *Kodifikasia*, 9(1), 121–146.
- Nurfadhillah, S. (2021). *Mengenai Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Puluhulawa, M. S. (2023). *Kepemimpinan Kepala Sekolah, Kompetensi Guru, Partisipasi Komite Sekolah Dan Pengelolaan Pembiayaan Sekolah Serta Pengaruhnya Terhadap Hasil Belajar Siswa*. Deepublish.
- Purandina, I. P. Y., Adil, A., Affandi, H., Sarasati, B., Khadri, M., Bur, R. A., & Pasaribu, N. P. W. (2022). *Membangun Pendidikan Karakter*. Padang: Global Eksekutif Teknologi. Retrieved from <https://books.google.co>
- Purwanto, A. (2021). *Sosiologi Industri dan Pekerjaan*. Deepublish.
- Ridwan, I., & Abdurrahim, A. (2023). Persepsi dan Pengamalan Moderasi Beragama

- dalam Mengembangkan Sikap Sosio-Religius dan Toleransi Beragama di Perguruan Tinggi Umum. *Jurnal Pendidikan Karakter JAWARA (Jujur, Adil, Wibawa, Amanah, Religius, Akuntabel)*, 9(1).
- Rosyid, M. Z. (2019). Kapitalisme Pendidikan Islam:(Antara Kompetisi dan Keadilan). *Akademika: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(2), 162–175.
- Rustiadi, E., Indraprahasta, G. S., & Mulya, S. P. (2020). *Teori Perencanaan: Madzab & Praktik Perencanaan Pengembangan Wilayah*. Crestpent Press & YOI Jakarta.
- Sani, R. A., & Kadri, M. (2016). *Pendidikan Karakter: Mengembangkan Karakter Anak yang Islami*. Bumi Aksara.
- Solihin, M. (2015). Kapitalisme pendidikan (analisis dampaknya terhadap upaya mencerdaskan kehidupan bangsa). *Nur El-Islam*, 2(2), 56–73.
- Surya, I. B., & Taibe, P. (2022). *Transormasi Spasial dan Perubahan Sosial Komunitas Lokal: Perspektif Dinamika Pembangunan Kawasan Kota Baru*. Chakti Pustaka Indonesia.
- Syamsuddin Mochtar, S. (2018). *STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN JOHN MAYNARD KEYNES DAN YUSUF QARDHAWI TENTANG PRODUKSI*. Pascasarjana IAIN Kendari.
- Zainal, V. R., Kamal, H., & Natsir, M. (2014). *The economics of education: Mengelola pendidikan secara profesional untuk meraih mutu dengan pendekatan bisnis*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Zaini, M. F. (2023). “ Orang Tua Durhaka, Adakah? (Telaah Fiqh). *Tebu Ireng*, 85(Maret-April 2023).
- Zulfa, E. N. (2014). Pengupahan Berkeadilan Menurut Hukum Islam. *Serang: Irama Offset*.